

KUASA PEREMPUAN DALAM SEJARAH INDONESIA KUNA¹

Ufi Saraswati

Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Semarang

Abstrak. Tulisan-tulisan tentang perempuan pada masa Jawa Kuna pada umumnya bersifat fragmentaris, sehingga dapat disampaikan bahwa sampai saat ini belum banyak dijumpai adanya tulisan yang mengaji perempuan secara mendalam dan komprehensif, khususnya yang membahas kuasa mereka dalam perannya sebagai perempuan. Kesetaraan kedudukan dan peranan perempuan dalam masyarakat Jawa Kuna hampir mencakup dalam pelbagai aspek kehidupan. Data tekstual maupun artefaktual di bidang politik, dapat diketahui bahwa perempuan dapat menduduki jabatan mulai dari jabatan pada struktur birokrasi yang paling rendah di pedesaan sampai kepada jabatan tertinggi. Meskipun dari segi kuantitas tidak sebanyak laki-laki, namun berdasarkan fakta yang tersampaikan dari kedua jenis data tersebut dapat disimpulkan bahwa laki-laki maupun perempuan pada masa Jawa Kuna mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih jabatan publik. Kaum perempuan pada masa Jawa Kuna dalam bidang sosial sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, baik sebagai pendamping suami maupun sebagai diri sendiri. Data tekstual maupun artefaktual menggambarkan adanya istri-istri yang mendampingi suaminya berkaitan dengan kedudukan dan peranannya sebagai istri, terutama di kalangan bangsawan dimana kaum perempuan mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan suami yang sesuai melalui pendidikan etika, seni, sastra dan bahasa, seperti tercermin dalam teks-teks sastra pada masa Jawa Kuna.

Kata-kata kunci: kuasa perempuan, data tekstual & konstektual, Indonesia kuna

Abstract. The works on woman in the ancient period are generally fragmentaric works. Therefore, there is no paper which could elaborate the women history in-depth and comprehensively, especially discussing their power in the role as the women. The egalaty of position and role in the ancient Javanese society is almost comprising all aspects of life. Based on textual and contextual data in political aspect, it could be known that women could reach the position started from the lowest bureaucracy in village to the highest position like a queen. However, the men are more than women in term of quantity but based on the facts, between men and women have the same opportunity to gain political position. Women in the ancient Javanese in social aspect have already engaged in the social activities. Between textual and contextual data describe that the women accompany their husbands related to the position and role as the wives, mainly in the aristocratic class when the women preparing themselves to gain the proper husband through th ethical, art, literature, and language education; as reflected in the textual soucres in the ancient Javanese.

Keywords: *the power of women, textual and contextual data, ancient Indonesia*

Sejarah mencatat adanya peran wanita di bidang politik. Wanita Indonesia sudah berperan dalam bidang politik jauh sebelum kolonialisme Barat. Nama-nama yang patut dicatat diantaranya adalah Ratu

Sima, Sanggramavijaya, Dharma Prasada Tunggadewi (tangan kanan Erlangga) dan sederet lainnya yang merupakan nama-nama yang sangat dikenal di seluruh Indonesia. Kesaksian tentang peranan

¹ Artikel ini merupakan pengembangan dari makalah yang pernah disajikan dalam Seminar Nasional Perempuan dalam Arus Sejarah tanggal 21 April 2016 di Universitas Negeri Malang

wanita banyak dijumpai dalam periode awal kerajaan-kerajaan Jawa. Salah satunya terdapat dalam kisah *Wangsa Isyana* dan keturunannya mendirikan kerajaan Singasari dan kerajaan Majapahit. Ken Dedes seorang tokoh dalam kerajaan Singasari merupakan salah satu contoh bagaimana seorang wanita menjadi dalang bagi peralihan kekuasaan dari Tunggal Ametung ke Ken Arok.

Kesetaraan gender antara kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam perspektif sejarah sesungguhnya bukan hal baru. Perempuan Indonesia pada masa Mataram Kuna sampai masa Majapahit sudah memperoleh kedudukan dan peranan setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Pada masa Jawa Kuna, Titi Surti Nastiti dalam disertasinya yang berjudul "*Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Masyarakat Jawa Kuna Abad 8-15 Masehi*" menyampaikan bahwa pada masa Jawa Kuna kaum perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan sama walaupun dari segi kuantitas tidak sebanyak kaum laki-laki. Menurut Nastiti selanjutnya dinyatakan bahwa kesetaraan dapat dicapai dalam meraih jabatan publik, kegiatan sosial, ekonomi, dunia kesenian, dan lainnya.

Di bidang pemerintahan, istri bisa mempunyai kekuasaan lebih tinggi daripada suaminya. Contohnya, Wikramawarddhana ketika mengeluarkan prasasti *Patapan II* (1385 M) dan prasasti *Tirah* atau *Karang Bogem* (1387 M) yang menggunakan lambang daerah Lasem, daerah kekuasaan Kusumawarddhani, istrinya. Pada saat itu, Wikramawarddhana belum menjadi raja. Penggunaan lambang tersebut mencerminkan kekuasaan Kusumawarddhani lebih besar daripada Wikramawarddhana. Hal sama terjadi pada Bhre Wirabhumi yang mendapat gelar dari istrinya, Nagarawarddhani. Bhre Wirabhumi sebelum menjabat sebagai

penguasa Lasem, Nagarawarddhani menjabat penguasa daerah Wirabhumi.

Nastiti melakukan kajian berdasarkan data tekstual dan artefaktual. Data tekstual berupa prasasti dari masa Mataram Kuna sampai masa Majapahit dalam bentuk teks sastra dan kumpulan teks, tertua seperti *Ramayana* dari masa *Rakai Watukura Dyah Balitung* sampai teks sastra dan hukum dari masa Majapahit. Data artefaktual yang sezaman diantaranya menggunakan arca, dan relief yang menempel pada candi atau stupa.

Kesetaraan kedudukan dan peranan antara perempuan dan laki-laki sejak masa Mataram Kuna sampai masa Majapahit berakar pada budaya yang tidak membedakan hak waris di semua kalangan. Tidak adanya perbedaan hak waris tersebut mempengaruhi konsep domestik dan publik sehingga laki-laki maupun perempuan dapat menjabat jabatan publik asalkan mengikuti ketentuan. Ada aturan tertentu yang harus diikuti dalam hal ini, misalnya untuk menduduki posisi putra atau putri mahkota harus anak pertama dari permaisuri, contohnya Sri Rajasawarddhani yang dalam prasasti *Kancana* atau yang disebut prasasti *Bunur B* menyebutkan, ia anak bungsu Hayam Wuruk. Dari kakawin *Nagarakrtagama* diketahui yang disebut sebagai Kusumawarddhani adalah putri mahkota. Putra pertama Hayam Wuruk seperti disebutkan teks *Pararaton* adalah Bhre Wirabhumi, karena bukan putra dari permaisuri, ia tidak dapat menjadi putra mahkota

WANITA DALAM PANDANGAN MASYARAKAT JAWA

Wanita Jawa sangat identik dengan kultur Jawa, seperti bertutur kata halus, tenang, diam (kalem), tidak suka konflik, mementingkan harmoni, menjunjung

tinggi nilai keluarga, mampu mengerti dan memahami orang lain, sopan, pengendalian diri tinggi atau terkontrol, dan daya tahan untuk menderita tinggi. Bila ada perselisihan ia lebih baik mengalah, tidak gegabah, tidak *grusa-grusu*, dan dalam mengambil langkah mencari penyelesaian dengan cara halus. Dalam konsep budaya Jawa terdapat beberapa istilah tentang wanita, yaitu : *wadon*, *pawèstri*, *putri*, *wanodya*, *retna*, *kusuma*, *memanis*, *juwita*, *wanita*, dan *dayita*, masing-masing istilah ini mempunyai arti tersendiri yang menunjukkan bahwa wanita dalam pandangan masyarakat Jawa memiliki peran istimewa (Basuki, 2005:5).

Kata wanita dalam etimologi Jawa itu berasal dari *wani ditoto* alias berani diatur. Menurut *Old Javanese-English Dictionary* (Zoetmulder, 1982), kata *wanita* berarti 'yang diinginkan'. Dari sudut pandang feminis, tentu saja pe-labelan 'wanita' ini adalah jejak-jejak peninggalan kultur *Patriarki* yang tertinggal dalam tatanan bahasa Indonesia. Wanita jadi diukur lewat seberapa besar tingkat kesetiaannya kepada lawan jenisnya, walaupun ternyata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pun berpihak kepada wanita sebagai ameliorasi dari perempuan:

pe.rem.pu.an [n] (1) orang (manusia) yg mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita; (2) istri; bini: — nya sedang hamil; (3) betina (khusus untuk hewan).
wa.ni.ta [n] perempuan dewasa: kaum — , kaum putri (dewasa) Perempuan diasosiasikan tanpa nilai, sementara wanita lebih mengarah kepada kedewasaan. Terang saja karena definisi dewasa di sini adalah sebuah pengabdian yang tersirat. Karena itu wanita dinilai tinggi ketika

bisa mengabdikan sehingga diinginkan oleh lelaki. Kesetiaan jadi lebih baik dari kemandirian.

Ternyata nilai wanita yang lebih tinggi dalam bahasa Indonesia ini menurut Ben Anderson (1966) adalah karena bahasa Indonesia mengalami "jawanisasi" atau "kramanisasi", kulitnya saja bahasa Melayu yang egaliter, tapi rohnya bahasa Jawa yang feodal. Arti kata perempuan sementara itu dari bahasa asalnya yaitu bahasa Sansekerta sangat berbeda dengan apa yang ada di KBBI. Perempuan berasal dari kata *per-empu-an*. *Per* itu berarti makhluk, *Empu* berasal dari kata Sansekerta yang berarti mulia, berilmu tinggi, pembuat suatu karya agung. Leluhur bangsa ini pun sudah memberikan makna dalam kata perempuan sebagai bentuk penghormatan tinggi kepada kaum wanita.

Masyarakat Indonesia dikenal dengan sistemnya yang *Patriarkis* meskipun sebenarnya terdapat variasi corak *Patriarki* antar budaya. Salah satu masyarakat yang dikenal dengan kebudayaannya yang *Patriarkis* adalah Jawa. Dalam budaya Jawa yang cenderung paternalistik laki-laki memiliki kedudukan yang istimewa (Handayani dan Novianto, 2004: 65).

Istilah wanita itu sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti *wani ditata* (berani ditata). Pengertian ini telah mencirikan adanya tuntutan kepasifan pada perempuan Jawa. Selain itu istilah putra mahkota (bukan putri mahkota), kawin paksa, dan babakan pingitan yang diberlakukan kepada perempuan yang akan menikah, menurut Widyastuti sebagai persoalan gender yang dihadapi perempuan Jawa. (Widyastuti, 2007: 67).

Mulai dari awal pemilihan pasangan hidup, laki-laki Jawa biasanya disarankan untuk tidak memilih perempuan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang

lebih tinggi. Selanjutnya dalam perkawinan, istilah *kanca wingking*, yakni bahwa perempuan adalah teman di dapur akan mewarnai kehidupan perkawinan pasutri Jawa. Istilah *konco wingking* pun tidak selalu lebih rendah, tergantung bagaimana perempuan Jawa memaknainya.

Jika perempuan selalu diidentikkan sebagai *kanca wingking* (teman di dapur) yang sering ditafsirkan oleh masyarakat Jawa pada umumnya sebagai kepasifan perempuan dan tugasnya hanya pada urusan rumah tangga, tidak demikian halnya dengan uraian dari berita Cina abad 7-8 M tentang keberadaan Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga (Keling) sebagai raja wanita pertama yang memerintah pada abad 6-7 M di Jawa. Berita Cina dari Dinasti Tang mengatakan bahwa kerajaan Holing (Kalingga) di Pulau Jawa ini sangat kuat. Orang Ta-Shih pada tahun 674 M mengurungkan niatnya untuk menyerang Negara ini disebabkan oleh keperkasaan Kalingga. Diberitakan pula bahwa di bawah pemerintahan Ratu Sima, Kerajaan Kalingga menjadi pemerintahan negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, bahkan, pernah saudara ratu sendiri terpaksa harus dihukum karena berani melanggar peraturan.

Kepemimpinan Ratu Sima ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sebuah negara dalam pengambilan keputusan sekalipun di bawah kendali seorang perempuan tidak berarti akan mendorong pada kemunduran dan kegagalan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan tidak adanya protes atas kepemimpinan Ratu Sima tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat Jawa kala itu sebenarnya sudah memberikan ruang yang besar pada perempuan untuk tidak hanya bergelut dengan urusan rumah tangga tapi juga

dapat turut campur dalam urusan kenegaraan.

Adanya konsep istri sebagai *sigaraning nyawa*, bukan sekedar *konco wingking* juga memberikan gambaran posisi yang sejajar dan lebih egaliter terhadap perempuan Jawa. Selain itu Handayani & Novianto juga berpendapat bahwa perempuan Jawa bukannya tidak memiliki otoritas pribadi. Hanya saja ia harus mencari cara agar kehendaknya terpenuhi tanpa mengacaukan harmoni dengan keluar dari tatanan budaya.

KUASA PEREMPUAN DALAM SEJARAH INDONESIA KUNA

Masa sejarah di Indonesia dibagi lagi atas sejarah kuna dan sejarah modern. Sejarah kuna ialah masa sejarah yang dimulai sejak adanya pengaruh India yang berupa tulisan sampai masa kolonial, sedangkan sejarah modern mengacu pada masa kolonial yang ditandai dengan datangnya bangsa Eropa ke Nusantara sampai sekarang. Sepanjang sejarah kebudayaan Indonesia, terdapat tiga gelombang kebudayaan besar yang datang ke Indonesia yaitu kebudayaan India, kebudayaan Islam, dan kebudayaan Eropa. Kedatangan ketiga kebudayaan tersebut menyebabkan terjadinya *Akulturas* antara kebudayaan Indonesia dengan ketiga kebudayaan itu.

Dalam kajian ini yang berjudul *Kuasa Perempuan dalam Sejarah Indonesia Kuna*. maka yang menjadi topik pembahasannya adalah segala kegiatan perempuan yang didapatkan dari data tekstual maupun data artefaktual dengan memakai kategori analisis gender yang berlaku pada masa Sejarah Indonesia Kuna. Gender adalah prinsip dasar dari hubungan sosial manusia yang didasarkan pada perbedaan dan persamaan laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara

kultural (Conkey dan Gero 1994:8; Preucel dan Hodder 1996:418; Gilrischt 1997:8; Hays-Gilpin dan Whitley, 1998:xv).

Rentangan masa dalam kajian yang cukup panjang (kurang lebih 7 abad) yaitu mulai dari masa Matarām Kuna sampai akhir Majapahit karena data tekstual (*prasasti, teks sastra/hukum, berita asing*) yang menuliskan mengenai perempuan sangat sedikit dan fragmentaris, sehingga apabila hanya mengkaji dalam satu masa saja sangat sulit untuk mendapat gambaran mengenai kedudukan dan peranan perempuan pada masa Jawa Kuna yang utuh.

Bukti Tekstual

Dalam data prasasti, baik laki-laki maupun perempuan banyak menduduki jabatan pemerintahan sebagaimana dijumpai pada prasasti *Juruñan* (876 M) dan prasasti *Wariñin Pitu* (1477 M). Perempuan pada masa itu juga sudah melibatkan diri dalam kegiatan sosial sebagai pendamping suami maupun sebagai diri sendiri. Dalam prasasti *Wulig* (935 M), Rakai Mangibil, selir Mpu Sindok, meresmikan tiga bendungan. Sedangkan pada relief candi sering ditampilkan raja atau bangsawan ditemani perempuan.

Perempuan bukan sebagai alat hiburan semata, tetapi juga menjadi sumber penghasilan keluarga dan ada perempuan profesional dalam bidang seni pertunjukan. Namun, walaupun kaum perempuan pada masa itu sudah menikmati kesetaraan hampir di semua aspek kehidupan, dalam hal tertentu, terutama di bidang keagamaan, perannya masih lebih rendah dari kaum laki-laki dalam *bela* dan *sati tukon*. Perempuan tidak dapat menjabat sebagai pejabat tertinggi keagamaan atau menjadi *Kawi*.

Selain prasasti, teks-teks sastra pun banyak menuliskan kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan

terutama dari kalangan bangsawan. Dalam Teks sastra digambarkan bagaimana kaum perempuan menghabiskan waktunya untuk menulis puisi atau kegiatan lainnya, dan bagaimana gambaran laki-laki yang berangkat ke medan perang, dan sebagainya.

Kedudukan dan peranan perempuan pada masa Jawa Kuna dalam bidang ekonomi tidak perlu diragukan lagi, terutama perempuan dari kalangan rakyat biasa. Mereka membantu perekonomian keluarga dengan membantu suami menggarap sawah atau ladang. Di sela-sela kesibukan bekerja di sawah/ladang, menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, mereka membuat barang-barang kerajinan seperti kain, barang-barang anyaman, barang-barang dari tanah liat, gula, minyak, dan sebagainya, yang digunakan untuk keperluan sendiri dan dijual. Selain itu, kaum perempuan pun handal dalam berniaga, yang dibuktikan dengan adanya pedagang-pedagang di tingkat eceran sampai saudagar (*bañigramī*) yang melakukan perdagangan tidak hanya di tingkat desa tapi mungkin sampai tingkat regional dan internasional.

Pada masa Jawa Kuna, masalah-masalah hukum diselesaikan oleh pejabat-pejabat kehakiman. Tidak banyak data tekstual yang menuliskan tentang masalah hukum. Satu-satunya prasasti yang isinya berkaitan dengan perempuan yang mempunyai kaitan dengan hukum adalah prasasti *Guntur* (907 M.). Prasasti ini menyebutkan adanya perempuan yang menjadi saksi (*tatra sāksī*) dan pemutus suatu perkara (*pinariccheda guñadośa*).

Pada masa Majapahit selain pejabat kehakiman yang disebut *i)t)dharmmopapat*, ada semacam Dewan Pertimbangan Kerajaan (*āra saptaprabhu*) yang beranggotakan keluarga kerajaan. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk memerintah, yang menjabat sebagai

Dewan Pertimbangan Kerajaan adalah raja, permaisuri, ayah-bunda raja paman raja, dua adik perempuan raja beserta suaminya. Apabila anggota Dewan Pertimbangan Kerajaan ini terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka pejabat kehakiman di tingkat pusat tidak pernah dijabat oleh perempuan.

Meskipun tidak pernah disebutkan adanya pejabat keagamaan perempuan, tidak berarti bahwa kaum perempuan tidak mempunyai peranan dalam bidang agama. Dalam beberapa prasasti disebutkan adanya pasangan suami istri yang membebaskan atau membeli tanah untuk keperluan suatu bangunan suci sebagai dharmma mereka. Selain itu prasasti *Taji (901 M.)* menyebutkan adanya warga desa laki-laki dan perempuan yang membeli tanah bagi *sīma* suatu bangunan suci.

Teks *Mānawadharmasāstra*, *Agastyaparwa*, dan *Krśṇayana* menuliskan bahwa perkawinan yang baik adalah perkawinan di antara orang yang sederajat. Pada masa Jawa Kuna, terutama masa Majapahit banyak perkawinan yang dilakukan di antara saudara sepupu

Bukti Artefaktual

Data artefaktual, terutama dijumpai pada relief-relief candi, baik candi-candi di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Banyak adegan yang menggambarkan kegiatan laki-laki maupun perempuan baik di lingkungan kerajaan maupun di lingkungan masyarakat biasa. Kegiatan di lingkungan istana biasanya digambarkan dalam adegan-adegan *paseban*, sedangkan kegiatan di lingkungan masyarakat pada umumnya menggambarkan kehidupan sehari-hari, seperti bertani dan berladang sebagaimana yang terdapat di beberapa relief di Stupa Borobudur.

Di samping itu ada beberapa relief yang menggambarkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan upacara keagamaan atau ada juga yang

menggambarkan mereka sedang menari atau memainkan musik. Pada relief-relief candi banyak adegan yang memahatkan adegan-adegan orang yang sedang memuja candi, baik perseorangan, pasangan suami istri maupun kelompok. Satu di antaranya dipahatkan di Stupa Borobudur yang menggambarkan pasangan suami-istri dari kalangan bangsawan yang memuja *stūpa*.

Di dalam dunia seni, terutama seni pertunjukan, kaum perempuan pada masa Jawa Kuna telah mempertunjukkan keahliannya di depan penonton. Dari data artefaktual diketahui bahwa keahliannya ini tidak hanya dipertunjukkan di dalam ruangan seperti yang dilakukan dalam pesta-pesta yang dilakukan oleh kaum bangsawan, tetapi juga ada kesenian yang dipertunjukkan di jalan. Bentuk-bentuk pertunjukan yang dipertontonkan selain tari-tarian juga sulap seperti yang digambarkan dalam relief Stupa Borobudur. Bagi perempuan pada Jawa Kuna, seni bukan hanya sebagai alat hiburan saja akan tetapi juga sebagai sumber penghasilan. Pada masa itu telah ada kaum perempuan profesional dalam bidang seni pertunjukan.

PENUTUP

Menarik untuk diungkapkan adalah adanya perbedaan gambaran mengenai kedudukan dan peranan perempuan dalam masyarakat Jawa Kuna antara apa yang ditulis dalam prasasti dan teks-teks sastra terutama kakawin. Data prasasti menunjukkan bahwa perempuan telah memegang peranan penting dalam masyarakat (van Setten van der Meer, 1979; Ayatrohaédi, 1986; Lombard, 1990; Nastiti 1998, 2001). Sebaliknya dengan kakawin yang menggambarkan perempuan masa lalu stereotip sebagai orang yang lemah dan subordinat dari laki-laki. Apabila diamati adanya perbedaan

perspektif itu dikarenakan sumber-sumber yang dipakai berbeda.

Beberapa Sarjana dan sumber Prasasti yang menuliskan bahwa kedudukan dan peranan perempuan setara dengan laki-laki didasarkan pada cerita rakyat asli dari Indonesia dan peristiwa yang pernah terjadi di Jawa. Helen Creese (2001), sementara sarjana yang menuliskan bahwa perempuan adalah subordinat laki-laki didasarkan pada uraian kakawin yang ceritanya berasal dari India dimana budayanya sangat *androsentris*. Maka dengan demikian jelas bahwa meskipun prasasti maupun kakawin sama-sama ditulis di Jawa, akan tetapi karena latar belakang budaya yang berbeda maka penggambaran mengenai kedudukan dan peranan perempuan pun berbeda.

Dalam pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin yang didasarkan pada *maskulinitas* dan *feminitas* seseorang sesuai dengan jenis kelaminnya, dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa Kuna. *Pertama* adalah pekerjaan-pekerjaan yang membedakan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, terutama pekerjaan yang menyangkut fisik dan umumnya terdapat di dalam masyarakat kalangan bawah. *Kedua*, pekerjaan-pekerjaan yang tidak membedakan laki-laki atau perempuan, terutama berlaku pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak memakai kekuatan fisik. Jenis pekerjaan seperti itu didapatkan di setiap lapisan masyarakat, seperti jabatan-jabatan yang ada di desa maupun di pusat.

Pembagian kerja secara fisik dapat diamati dari data artefaktual yang berupa relief misalnya, digambarkan perempuan menanam padi dan memanen hasil pertanian, sedang laki-laki mencangkul dan membajak. Selain itu ada pekerjaan-pekerjaan lain yang tampaknya dibedakan atas fisik mereka seperti yang tergambar dalam relief-relief. Digambarkan dalam

relief beberapa pekerjaan laki-laki misalnya, keluar rumah untuk menangkap ikan, berburu, menggembala, dan sebagainya sementara perempuan mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mengasuh anak, memasak, serta membuat produksi rumah tangga seperti menenun dan membuat barang-barang dari tanah liat. Tetapi tidak berarti bahwa laki-laki tidak bisa memasak, karena ada beberapa relief yang menggambarkan laki-laki yang sedang memasak dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Pekerjaan-pekerjaan seperti telah disebutkan di atas masih dapat ditemukan di dalam kehidupan masyarakat Jawa dan Bali sekarang, meskipun ada beberapa pekerjaan yang sudah mulai berangsur-angsur hilang bahkan ada yang sudah lenyap sama sekali. Adanya pembagian pekerjaan tersebut bukan berarti kelompok yang satu mendominasi yang lain, akan tetapi justru saling melengkapi karena mereka sadar akan adanya perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan.

Tidak semua peranan dan kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat Jawa Kuna setara dengan laki-laki. Ada beberapa aspek yang tidak setara, baik ketidaksetaraan itu lebih tinggi atau lebih rendah dari laki-laki. Dapat dikemukakan di sini bahwa dalam percaturan politik, perempuan tidak saja dapat tampil di ranah publik karena ia memegang suatu jabatan, tetapi juga berperan secara tidak langsung di belakang suaminya. Berdasarkan data tekstual dapat diketahui ada beberapa raja yang diduga menjadi raja karena perkawinan. Sebagai contoh adalah *Rakai Watukura Dyah Balitung* yang diasumsikan menikah dengan putri mahkota. Seperti diketahui bahwa ayah Balitung hanyalah seorang raja bawahan (*haji*). Demikian pula dengan *Airlangga* dan *Raden Wijaya*, keduanya

menikahi putri mahkota dan putri-putri raja pendahulunya.

Adapun peranan perempuan yang lebih rendah dari laki-laki adalah *bela* atau *sati*, tukon, perempuan yang tidak dapat menjabat sebagai pejabat-pejabat tertinggi keagamaan atau perempuan tidak dapat menjadi seorang *Kawi*. Apabila ditelusuri asal mula dari adat istiadat yang menyebabkan adanya ketidaksetaraan maka dapat diketahui bahwa semua itu berasal dari kebudayaan India. Meskipun demikian dalam mengadopsi kebudayaan India, masyarakat Jawa Kuna tidak menerapkan langsung ke dalam budayanya, tetapi ada hal-hal yang disesuaikan dengan budayanya. Seperti yang disebutkan oleh berita Portugis yang melakukan *bela* atau *sati* ini tidak hanya dilakukan oleh perempuan tetapi juga oleh laki-laki bangsawan yang bunuh diri sebagai tanda setia kepada rajanya. Adanya laki-laki yang ikut *bela* atau *sati* tidak didapatkan di negara asalnya. Selain itu dalam melakukan *bela* atau *sati*, perempuan tidak langsung menerjunkan diri langsung ke dalam api yang berkobar seperti yang terjadi di India, tetapi menikam dirinya dulu sebelum jatuh ke dalam api. Hal ini mungkin dilakukan untuk mengurangi rasa sakit dari perempuan yang melakukan *bela* atau *sati* dan lebih manusiawi daripada yang dilakukan di India.

Dalam masalah hukum pun, hukuman yang dijatuhkan kepada laki-laki yang melakukan pelecehan seksual (*paradāra*) lebih berat daripada aturan-aturan yang terdapat dalam perundang-undangan di India, meskipun seperti telah dikemukakan bahwa kitab-kitab perundangan-undangan yang ada di Jawa bersumber kepada kitab-kitab perundang-undangan India. Perbedaan ini karena seperti yang disebutkan dalam prasasti *Bendosari* dan *Paruṅ* adalah karena

masyarakat Jawa Kuna telah mempunyai hukum adat yang dijadikan dasar pertimbangan selain kitab-kitab hukum.

Adanya anugerah raja kepada pejabat yang telah berjasa seperti *angjamaḥ rare*, *angjamaḥ kawula*, dan *menikahi ūayang*, meskipun hal ini tampaknya merendahkan derajat kaum perempuan, tetapi apabila diteliti secara seksama sebenarnya hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan, karena dengan adanya hak-hak istimewa sebagai anugerah raja, maka tidak sembarang laki-laki terutama dari kalangan bangsawan yang dapat melakukan hal-hal yang melecehkan kaum perempuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayatrohaédi, ed. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Basuki, A. R. 2005. *Perempuan (di mata Budaya Jawa)*. Bende Media Informasi Seni dan Budaya. Surabaya: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur.
- Conkey, M.W. dan J. M. Gero. 1994 "Tensions, Pluralities, and Engendering Archaeology: An Introduction to Women and Prehistory". Dalam Joan M. Gero and Margaret W. Conkey, ed. *Engendering Archaeology. Women and Prehistory*. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell, page :3–30. Cetak ulang.
- Creese, H. 2001 "Images of Women and Embodiment in Kakawin Literature", dalam *Intersections: Gender, History and Culture in the*

- Asian Context*, Issue 5, May 2001,
URL:<http://www.she.murdoch.edu.au/intersection/issue5/crease.html>, accessed 22 May 2001.
- Gilchrist, R. *Gender and Material Culture. The Archaeology of Religious Women*. London dan New York: Routledge, 1997.
- Handayani, C.S & Novianto, A. 2004. *Kuasa Wanita Jawa*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara
- Hays-Gilpin, K dan David S. Whitley. 1998. *Reader in Gender Archaeology*. London: Routledge, 1998.
- Lombard, D. 1990. *Nusa Jawa: Silang Budaya. Penelitian Sejarah Terpadu Bagian 3: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*. Jakarta: Gramedia, 1996. *Trans. dari Le Carrefour Javanais. Essai d'histoire globale. III: L'heritage des royaumes concentriques*.
- Nastiti, T. S. 1998 "Wanita pada Masa Jawa Abad IX-XV Masehi". Dalam *Kongres Nasional Sejarah 1996*. Subtema Pemikiran dan Analisis Teks Sejarah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, hal:107-26.
- , 2009. *Kedudukan dan Peranan Perempuan dalam Masyarakat Jawa Kuna (Abad VIII - XV Masehi): Ringkasan Disertasi*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Preucel, R. dan Hodder, I. 1996. *Contemporary Archaeology in Theory*, ed. Oxford; Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publisher Ltd.
- van Setten van der Meer, 1979. N.C. *Sawah Cultivation in Ancient Java: Aspect of Development on the Indo-Javanese Period*. Canberra: Australian National University Press.
- Widyastuti, S.H. 2007 "Perempuan Menerjang Hambatan Budaya: Catatan Dari Lapangan" dalam *Jurnal Reformasi Ekonomi* Vol. 8, No. 1. Januari-Desember 2007.